

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Indonesia merupakan salah satu negara yang tergabung dalam MEA atau Masyarakat Ekonomi ASEAN sejak tahun 2015 lalu. Negara besar yang memiliki jumlah penduduk sekitar 269 juta jiwa telah melakukan berbagai strategi untuk menumbuhkan perekonomian negara dalam menghadapi MEA, hal tersebut dikutip dari *webside* resmi Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia yaitu kemlu.go.id pada 29 Januari 2020. Selain pengembangan dalam bidang pariwisata, pemerintah Indonesia juga mengeluarkan berbagai kebijakan untuk meningkatkan produktivitas Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) sebagai salah satu pilar kemajuan perekonomian negara. Sebagai mana yang tercantum dalam undang-undang nomor 20 tahun 2008 tentang usaha mikro, kecil, dan menengah bahwa UMKM perlu diberdayakan untuk mewujudkan perekonomian nasional yang seimbang, berkembang, dan berkeadilan sebagai bagian dari integral ekonomi rakyat.

UMKM yang merupakan salah satu pilar pendukung kemajuan perekonomian Indonesia erat kaitannya dengan koperasi, Dewi (2018) menyatakan UMKM adalah usaha orang perorangan yang berdiri sendiri dan bukan anak perusahaan atau cabang perusahaan yang dimiliki oleh warga negara

Indonesia, sedangkan koperasi merupakan kumpulan orang yang bekerja sama untuk mencapai tujuan bersama. Koperasi adalah bagian dari UMKM yang juga merupakan salah satu pilar pendukung kemajuan perekonomian nasional. Koperasi merupakan usaha yang berasaskan kekeluargaan dan gotong royong membuat koperasi menjadi sedikit berbeda dengan lembaga jasa keuangan lainnya. Terbukti pada saat krisis moneter pada tahun 1998 koperasilah yang membantu masyarakat untuk bertahan dan koperasi juga merupakan saka guru perekonomian nasional. Dimana koperasi dapat memberikan pendanaan bagi UMKM di Indonesia (Solopos.com, diakses pada 28 Januari 2020). Koperasi memegang sebuah peran yang sangat penting dalam upaya pembangunan bangsa sebagai wujud usaha untuk mencapai tujuan nasional. Peran koperasi diantaranya sebagai organisasi atau lembaga penyedia lapangan pekerjaan, membantu pengembangan potensi ekonomi bagi anggota, dan merupakan pilar utama ketahanan ekonomi masyarakat Indonesia (Dewi, 2018). Perjuangan koperasi terjalin dalam suatu gerakan tertentu yang bersifat nasional, hal tersebut mengakibatkan keberadaan koperasi juga dimaksudkan untuk pembangunan suatu tatanan perekonomian secara regional maupun nasional. (Nurita, 2017)

Berbeda dengan lembaga keuangan lainnya yang bersifat *profit oriented* yaitu yang bertujuan untuk memperoleh keuntungan atau laba, koperasi bersifat *service* atau lebih memaksimalkan pelayanan kepada anggota guna mencapai kemajuan usaha bersama. Koperasi dicanangkan pemerintah Indonesia untuk mensejahterakan kehidupan masyarakat, hal ini dapat dilihat dari peran koperasi dalam perekonomian Indonesia diantaranya : (1) mengembangkan kegiatan ekonomi di berbagai sektor, (2) penyedia lapangan pekerjaan, (3) pengembangan

ekonomi lokal dan pemberdayaan masyarakat, serta (4) menciptakan pasar baru dan sebagai sumber inovasi, dan (5) memberikan pemasukan dalam menjaga neraca pembayaran melalui kegiatan ekspor (Dewi, 2018).

Menurut data dari Departemen Koperasi dan UMKM Republik Indonesia yang diakses melalui depkop.go.id pada 29 Januari 2020 saat ini per Juni 2019 terdapat sekitar 35.761 unit koperasi dengan sertifikat Nomor Induk Koperasi (NIK) yang artinya bahwa koperasi tersebut aktif secara kelembagaan dan usaha yang minimal telah melaksanakan RAT (Rapat Anggota Tahunan) selama 3 tahun terakhir. Dari 35.761 unit koperasi tersebut, sebanyak 4.949 unit koperasi tersebar di Provinsi Bali per bulan Juni 2019. Denata (2018), dikutip melalui bali.tribunnews.com yang diakses pada 30 Januari 2020 mengungkapkan 789 unit koperasi yang tidak aktif terdapat 150 unit koperasi yang dibubarkan pada tahun 2019 dan 9 koperasi binaan provinsi yang telah diusulkan ke Kementerian dan UKM juga ikut di bubarkan.

Berdasarkan kasus tersebut dimana banyaknya koperasi yang tidak aktif dirasa perlu contoh nyata untuk memberikan motivasi dan sebagai panutan bagi koperasi lainnya untuk terus meningkatkan kinerjanya. Salah satunya adalah Koperasi Simpan Pinjam (KSP) Guna Prima Dana yang merupakan koperasi berprestasi yang patut dicontoh oleh koperasi lainnya. Penghargaan sebagai koperasi berprestasi tingkat Provinsi Bali tahun 2017, koperasi berprestasi tingkat nasional tahun 2018, dan pada tahun 2020 kembali mewakili Kabupaten Badung dalam pemilihan koperasi berprestasi. Beberapa aspek yang harus dipenuhi sebagai syarat menjadi koperasi berprestasi sesuai dengan Peraturan Menteri Koperasi dan UKM Republik Indonesia nomor: 06/Per/M.KUKM/V/2006 tentang

Pedoman Penilaian Koperasi Berprestasi atau Koperasi Award, diantaranya : (1) aspek organisasi yang terdiri dari pelunasan simpanan pokok anggota, pelunasan simpanan wajib anggota, penyelenggaraan RAT, rasio kehadiran anggota dalam RAT, rencana kegiatan dan rencana anggaran pendapatan dan belanja koperasi, rasio peningkatan jumlah anggota, pendidikan dan pelatihan bagi anggota, pendidikan dan pelatihan bagi pengelola koperasi, ketersediaan anggaran khusus dan penyisihan dana pendidikan, serta adanya pemeriksaan baik dari internal maupun eksternal koperasi yang bersangkutan, (2) aspek tata laksana dan manajemen yang terdiri dari pencatatan rasio kenaggotaan dalam buku daftar anggota dan telah ditanda tangani oleh anggota, realisasi anggaran pendapatan koperasi, realisasi anggaran belanja, realisasi surplus hasil usaha koperasi, keterkaitan usaha koperasi dengan usaha anggota, penerangan dan penyuluhan, media informasi, serta sarana kantor dan usaha koperasi, (3) aspek produktivitas yang terdiri dari rentabilitas modal sendiri, *return on asset*, *asset turn over*, kemampuan menghasilkan laba (*net profit margin*), *current ratio*, total hutang terhadap aset, total utang terhadap modal sendiri, transaksi usaha koperasi dengan usaha anggota, serta perputaran piutang, (4) aspek manfaat dan dampak yang terdiri dari kerja sama usaha secara vertikal, kerja sama koperasi dengan badan usaha lainnya, manfaat kerja sama, penyerapan tenaga kerja, pembayaran pajak, cukai atau retribusi, serta dana sosial.

Dengan pencapaian prestasi tersebut KSP Guna Prima Dana dipilih sebagai koperasi penyalur KUR di Indonesia. Saat ini terdapat 3 koperasi penyalur KUR di Indonesia dan berlokasi di Jalan Uluwatu nomor 333 Ungasan Kuta Selatan Badung Bali (indoprimier.com diakses pada 9 maret 2020). Untuk bisa

menyalurkan KUR, koperasi harus memenuhi berbagai syarat dan ketentuan sesuai Keputusan Menteri Koperasi dan UKM Nomor 14/2016 tentang KSP sebagai penyalur KUR dan KSP Guna Prima Dana telah dinilai oleh tiga tim dari Deputi Pembiayaan, Deputi Kelembagaan dan Deputi Pengawasan sehingga akhirnya bisa menyalurkan KUR.

KUR pertama kali muncul pada masa pemerintah Presiden Susilo Bambang Yudoyono. Tepatnya pada tanggal 5 November 2007 berdasarkan atas amanat Instruksi Presiden Nomor 6 Tahun 2007 tentang Kebijakan Percepatan Pengembangan Sektor Riil dan Pemberdayaan UMKM. Kredit usaha rakyat atau yang disingkat KUR merupakan upaya pemerintah dalam menjawab berbagai persoalan UMKM dalam menghadapi permasalahan keuangan. Kredit usaha dengan bunga efektif 6% pertahun di rasa mampu mengatasi kekhawatiran masyarakat dalam kesulitan permodalan untuk mengembangkan usaha. Bank BUMN ditunjuk oleh pemerintah untuk memberikan pelayanan KUR kepada masyarakat. Selain bank, koperasi sebagai lembaga keuangan juga memiliki peluang yang sama untuk dapat menyalurkan KUR. Kebijakan KUR dinilai dapat membantu UMKM untuk lebih berkembang dan menemukan kreditur yang tepat dengan nilai bunga yang dirasa sangat membantu UMKM dan juga pihak bank terjamin sebagai pihak debitur (Ahsan dan Faizal, 2018). KUR adalah kredit yang diberikan kepada UMKM termasuk koperasi yang juga merupakan bagian dari UMKM yang *feasible* namun belum *bankable* (Soviana, 2013).

Diakses melalui www.depko.go.id yang merupakan *webside* resmi Kementerian Keuangan Republik Indonesia pada 29 Maret 2020, pada tahap awal penyaluran KUR lembaga keuangan baik bank maupun koperasi ditunjuk oleh

pemerintah untuk menyalurkan KUR kepada masyarakat dengan salah satu syarat yang harus dipenuhi adalah mendapatkan rekomendasi dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK) atau Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil Menengah. Pada kenyataannya hingga saat ini terdapat sekitar 38 bank sebagai penyalur KUR dari jumlah keseluruhan yaitu 45 lembaga keuangan penyalur KUR yang terdiri dari bank, koperasi dan lembaga pembiayaan lain (Dewantoro, 2020). Dari data tersebut bank merupakan lembaga keuangan dengan jumlah terbanyak sebagai penyalur KUR, hal tersebut disebabkan karena bank lebih siap dibandingkan dengan koperasi. Kesiapan yang dimaksud ialah kesiapan secara modal dan sistem, baik sistem manajemen yang terencana maupun sistem aplikasi yang sudah berbasis *online* (Soviana, 2013).

Namun kini, di Provinsi Bali khususnya Kabupaten Badung terdapat satu koperasi yang dapat menyalurkan KUR Mikro seperti bank penyalur KUR lainnya. Pada dasarnya KUR ini berfungsi untuk mendorong dan melancarkan berbagai jenis usaha yang dijalankan oleh masyarakat sehingga dapat meningkatkan taraf hidupnya. Namun, hanya sedikit masyarakat yang mengetahui bahwa koperasi juga dapat menyalurkan KUR sama seperti bank penyalur KUR lainnya. Dewi (2017) dalam penelitiannya menyatakan bahwa sistem dan prosedur pemberian kredit usaha rakyat pada PT.Bank Rakyat Indonesia dari tahapan permohonan, peminjaman, analisis kredit, pemberian keputusan kredit, perjanjian kredit dan pencarian kredit. Dokumen yang digunakan adalah formulir permohonan kredit, surat keterangan usaha dari kelurahan, formulir keputusan pencarian kredit. Bagian-bagian yang terlibat dalam pemberian kredit adalah bagian pemasaran, analisis kredit, pimpinan cabang, wakil pimpinan cabang,

bagian hukum dan administrasi kredit dan teller. Soviana (2013) juga mengungkapkan bahwa mekanisme penyaluran KUR sama seperti kredit pada umumnya. Kebijakan yang ditetapkan oleh bank adalah penetapan jangka waktu kredit yang hanya sampai dengan 3 tahun, wajib melakukan pengecekan dengan Sistem Informasi Debitur (SID) dan agunan tambahan dapat berupa sertifikat rumah, BPKB mobil atau sepeda motor. Strategi perencanaan bank yakni *matching* antara *core bussines* dan peraturan Pemerintah. Dalam hal pembinaan dan pengawasan, tidak dilakukan atau tidak sesuai dengan prosedur. Untuk penanganan kredit macet, dilakukan penagihan secara berkala, penyitaan barang jaminan, dan atau pengajuan klaim kepada pihak penjamin. Strategi perluasan penyaluran KUR adalah pendirian unit kerja baru dan perekrutan SDM yang berkualitas. Selain itu strategi marketing berada ditangan masing-masing Mantri. Namun, seperti yang kita ketahui bahwa koperasi merupakan organisasi yang berasaskan kekeluargaan sehingga mekanisme dan strategi serta kebijakan pengawasan penyaluran KUR pada koperasi menjadi topik permasalahan dalam penelitian ini.

Mekanisme dan strategi pengawasan penyaluran KUR pada KSP Guna Prima Dana merupakan masalah unik yang diangkat peneliti agar masyarakat dapat mengetahui sistem pemberian KUR pada koperasi khususnya KSP Guna Prima Dana dan juga memotivasi koperasi lainnya agar nantinya dapat menyalurkan KUR seperti KSP Guna Prima Dana serta meningkatkan prestasinya sehingga dapat menambah kontribusi bagi perekonomian masyarakat. Kemudian pada lokasi penelitian, disini peneliti menggunakan KSP Guna Prima Dana sebagai objek penelitian karena terdapat beberapa faktor yang memotivasi untuk

dilakukannya penelitian di tempat tersebut mengenai mekanisme dan strategi serta kebijakan penyaluran KUR pada koperasi. Adapun alasannya adalah sebagai berikut: (1) KSP Guna Prima Dana merupakan satu-satunya koperasi penyalur KUR di Bali saat ini, dan hanya terdapat tiga koperasi penyalur KUR di Indonesia dimana dua lainnya berada di Jawa Tengah dan Nusa Tenggara Timur. (2) Karena KSP Guna Prima Dana merupakan koperasi berprestasi tingkat nasional tahun 2018 dan koperasi berprestasi tingkat provinsi tahun 2017 yang dinilai berdasarkan Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia. (3) Karena kemajuan teknologi dan modernisasi, koperasi dirasa perlu mengikuti arus perkembangan zaman yaitu dengan menggunakan teknologi informasi secara online dalam melaksanakan tugas dan kewajibannya melayani anggota dan nasabah sehingga mampu meningkatkan kinerja dan pengawasan yang lebih mudah. KSP Guna Prima Dana dalam melayani nasabah telah memanfaatkan teknologi informasi secara online yang dibuktikan dengan adanya net banking dan pencatatan transaksi kolektor melalui aplikasi online. (4) Sistem informasi manajemen dan sistem informasi akuntansi telah terotorisasi dengan baik. Pengaplikasian tugas dan tanggung jawab telah dilaksanakan sesuai dengan struktur organisasi.

Penelitian ini merupakan replikasi dari penelitian yang dilakukan oleh Soviana (2013) yang meneliti tentang Mekanisme dan Strategi Penyaluran Kredit Usaha Rakyat (KUR) Mikro (Studi Kasus pada PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Kantor Wilayah Malang dengan hasil penelitian menyatakan bahwa mekanisme penyaluran KUR sama seperti penyaluran kredit pada umumnya, namun kebijakan yang ditetapkan oleh BRI adalah penetapan jangka waktu kredit

yang hanya sampai dengan 3 tahun, wajib melakukan pengecekan dengan SID dan agunan tambahan dapat berupa sertifikat rumah, BPKB mobil atau sepeda motor. Adapun perbedaan penelitian yang dilakukan penulis dengan penelitian Soviana (2013) adalah objek penelitian yang menggunakan KSP Guna Prima Dana dan juga permasalahan yang diangkat dalam penelitian ini yaitu mekanisme pemberian KUR, strategi dan kebijakan penyaluran KUR, strategi dan kebijakan pengawasan debitur KUR, serta strategi dan kebijakan pengawasa internal penyaluran KUR. Sedangkan metode penelitian dalam penelitian ini masih sama dengan penelitian Soviana (2013) yaitu menggunakan metode kualitatif. Sehingga pada akhirnya peneliti mengangkat judul mengenai “Mekanisme dan Strategi Pengawasan dalam Penyaluran Kredit Usaha Rakyat (KUR) pada Koperasi Simpan Pinjam (KSP) Guna Prima Dana”. Tujuan diangkat judul ini ialah untuk mengetahui mekanisme penyaluran KUR pada koperasi khususnya KSP Guna Prima Dana serta strategi dan kebijakan yang diterapkan KSP Guna Prima Dana baik dalam meyalurkan KUR, pengawasan debitur KUR, dan pengawasan internalnya.

1.2 Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan di atas, masalah yang dapat diidentifikasi adalah sebagai berikut.

- 1.2.1 Koperasi merupakan organisasi yang berasaskan kekeluargaan dan gotong royong yang di bangun bersama anggota untuk mencapai tujuan bersama, sehingga penyaluran kredit pada koperasi umumnya hanya bisa disalurkan kepada anggota. Namun, KUR pada prinsipnya dapat disalurkan kepada seluruh UMKM yang membutuhkan dukungan dana.

1.2.2 Bank umum memiliki kantor cabang yang tersebar diseluruh Indonesia sehingga memudahkan dalam pemasaran produk atau jasa perbankan yang dimiliki, namun koperasi umumnya hanya memiliki beberapa kantor cabang dalam satu wilayah tertentu saja menjadikan koperasi memiliki batasan dalam memasarkan produk atau jasa koperasinya.

1.2.3 Koperasi yang berasaskan kekeluargaan dan rasa saling percaya dalam menjalankan kegiatan operasionalnya lebih memungkinkan terjadinya pelanggaran *Standar Operasional Prosedur* (SOP) dan membuat koperasi tidak mampu berkembang.

1.3 Pembatasan Masalah

Untuk lebih memfokuskan penelitian pada pokok permasalahan dan mencegah terlalu luasnya pembahasan yang mengakibatkan terjadinya kesalahan interpretasi terhadap simpulan yang dihasilkan, maka dalam penelitian ini dibuatkan pembatasan bahwa penelitian ini akan menitikberatkan pada mekanisme, strategi, dan kebijakan yang diterapkan oleh KSP Guna Prima Dana dalam menyalurkan KUR dan pengawasan penyaluran KUR secara internal maupun pengawasan debiturnya.

1.4 Rumusan Masalah

Menjadi satu-satunya di Bali merupakan keunikan tersendiri bagi KSP Guna Prima Dana dalam menjalankan tugas dan fungsinya sebagai koperasi. Oleh karena hal itu dapat dirumuskan permasalahan sebagai berikut :

1.4.1 Bagaimana mekanisme penyaluran KUR di KSP Guna Prima Dana ?

- 1.4.2 Bagaimana strategi dan kebijakan yang diterapkan oleh KSP Guna Prima Dana dalam menyalurkan KUR ?
- 1.4.3 Bagaimana strategi dan kebijakan yang diterapkan oleh KSP Guna Prima Dana dalam pengawasan debitur KUR ?
- 1.4.4 Bagaimana strategi dan kebijakan yang diterapkan oleh KSP Guna Prima Dana dalam pengendalian internal penyaluran KUR ?

1.5 Tujuan Penelitian

Berdasarkan uraian latar belakang dan rumusan masalah diatas, maka tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut :

- 1.5.1 Untuk mengetahui mekanisme penyaluran KUR di KSP Guna Prima Dana.
- 1.5.2 Untuk mengetahui strategi dan kebijakan yang diterapkan oleh KSP Guna Prima Dana dalam menyalurkan KUR.
- 1.5.3 Untuk mengetahui strategi dan kebijakan yang diterapkan oleh KSP Guna Prima Dana dalam pengawasan debitur KUR.
- 1.5.4 Untuk mengetahui strategi dan kebijakan yang diterapkan oleh KSP Guna Prima Dana dalam pengawasan internal penyaluran KUR.

1.6 Manfaat Hasil Penelitian

Manfaat yang dapat diberikan dari adanya penelitian ini, baik secara teoritis maupun secara praktis, yaitu :

- 1.6.1 Manfaat Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan tambahan pengetahuan dan wawasan yang luas bagi penulis dan berbagai pihak yang berkaitan dengan mekanisme dan strategi penyaluran KUR pada KSP Guna Prima Dana sehingga hasilnya dapat digunakan sebagai acuan bagi penelitian berikutnya serta referensi bagi pemerintah dalam mengevaluasi kebijakan.

1.6.2 Manfaat Praktis

(a) Bagi KSP Guna Prima Dana

Penelitian ini diharapkan memberikan masukan untuk terus meningkatkan kinerja serta kualitas layanan sehingga dapat meningkatkan perekonomian masyarakat serta meningkatkan nilai KUR yang dapat disalurkan.

(b) Bagi Lembaga

Penelitian ini diharapkan dapat menambah sumber referensi kepustakaan bagi para peneliti kedepannya, sehingga mampu memberikan kontribusi ilmiah dan tambahan bukti empiris terutama dalam pengembangan teori yang berkaitan dengan mekanisme dan strategi penyaluran KUR pada KSP.

(c) Bagi Peneliti Lain

Hasil penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sebagai salah satu referensi bagi para peneliti bidang akuntansi sebagai bahan untuk mendalami objek penelitian yang sejenis serta bahan dalam mengembangkan penelitian tingkat yang lebih lanjut.